

PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA RUSUNAWA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAYAK HUNI DI KOTA PADANG

Luthva Maqvira¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H¹, Suamperi, S.H, M.H¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia untuk memacu pembangunan rumah susun, tertuang dalam Keputusan Presiden No. 22 tahun 2006 tentang Rusun. Pembangunan rumah susun adalah suatu cara memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Peranan Pemerintah dalam Pemenuhan sarana dan prasarana Rusunawa di kota Padang? (2) Apakah hambatan yang ditemukan Pemerintah Kota dalam proses Pemenuhan sarana dan prasarana Rusunawa di kota Padang? (3) Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam Pemenuhan sarana dan prasarana Rusunawa di Kota Padang? Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Simpulan hasil penelitian: (1) Peranan pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan rusunawa adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, aspek-aspek pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. (2) Beberapa masalah pada dasarnya bersumber dari sisi pasokan maupun kebutuhan serta Keterbatasan dana, Sulitnya ketersediaan lahan, sulit mendapat perizinan (3) Upaya pemerintah dalam memperbaiki lingkungan rumah susun dengan cara sosialisasi dan mengadakan perbaikan-perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di rumah susun dan menjalin kerjasama dengan dinas terkait untuk mengawasi rusunawa tersebut.

Kata kunci: Peranan, Pemerintah, Pembangunan, Rusunawa